

## BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Bantul merupakan salah satu wilayah kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah lebih kurang 506,85 km persegi, dibagi dalam 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Dusun. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2013 berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2012 mencapai 921.263 jiwa dengan kepadatan lebih dari 1.612 jiwa per km persegi. Kondisi ini termasuk sangat padat bila dibandingkan dengan dua kabupaten lain yaitu Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Pada tahun 2012, lapangan usaha yang memberikan sumbangan signifikan kepada PDRB Kabupaten Bantul adalah pertanian sebesar 34,47%, industri pengolahan sebesar 27,16%, perdagangan hotel dan restoran sebesar 22,66% dan jasa-jasa sebesar 21,72%. Pada tahun 2013 sumbangan ke-empat sektor tersebut di atas masih tetap dominan dan selalu terjadi trend pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 32,11% (turun 1,36%), industri pengolahan sebesar 24,72% atau turun 3,40%, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,92% atau naik 0,39% dan jasa-jasa sebesar 13,10% atau turun 0,18%. Secara keseluruhan

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 3,17% penurunan pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 disebabkan adanya kemarau panjang, hal ini berakibat pada penurunan pertumbuhan yang sangat tajam untuk sektor industri pengolahan. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 27,62% pertahun untuk harga berlaku dan 5,67% untuk harga konstan.

**Sumber :** PDRB Kabupaten Bantul 2012-2013 Bappeda Kab. Bantul).

a. **Visi dan Misi Kabupaten Bantul**

a) **Visi**

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu: **"BANTULPROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS"**. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai

Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang. Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya. pada kreativitas manusiawi. Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama

dengan penuh rasa tanggung jawab. Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.

#### **b) Misi**

Adapun misi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum.

#### **2. Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

Sebelah utara dengan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur dengan Kabupaten Gunung Kidul dan sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul terletak antara  $07^{\circ} 44' 04''$  -  $08^{\circ} 00' 27''$  Lintang Selatan

1.  $110^{\circ} 13' 24''$  -  $110^{\circ} 21' 08''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten

Bantul 508,85 Km<sup>2</sup> (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan fotografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km<sup>2</sup> (41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek

### **3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Masyarakat Kabupaten Bantul yang 56 persen menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, 13 persen pada sektor industri kerajinan. tangga dan sisanya menggantungkan pada sektor-sektor lainnya. Berikut dapat dilihat kehidupan masyarakat dari keadaan sosial ekonomi masyarakat

#### **a. Pendidikan**

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Bantul adalah pada sektor pendidikan. Sarana pendidikan yang memadai akan dapat memacu peningkatan kualitas dari

Sumber Daya Manusia terutama bagi generasi muda. Kualitas Sumber

Daya Manusia sangat diperlukan dalam menjelang dan menghadapi era globalisasi, terutama menghadapi pasar bebas. Peningkatan mutu SDM diharapkan pula bersamaan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki SDM. Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Bantul mulai dari pendidikan non-formal (PAUD dan TK) sampai dengan perguruan tinggi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, serta kursus-kursus ketrampilan yang semakin banyak berkembang di Bantul.

**Tabel 2.1. Kondisi Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Jenjang	Jumlah Sekolah		Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Guru Sertifikasi
		Negeri	Swasta			
1	SD	279	74	71.429	5.191	3.253
2	MI	3	24	2.895	1.035	302
3	SDLB	2	14	348	238	-
4	SMP	47	38	28.390	3.146	2.680
5	MTs	9	13	5.651	581	405
6	SMPLB	2	14	243	58	-
7	SMA/MA	23	22	14.768	1.680	848
8	SMK	13	28	14.710	1.654	709

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal

**Tabel 2.2. Perbandingan Sekolah, Siswa, Guru,  
Kelas Sekolah 2011/2012**

No	Jenis Sekolah	Sekolah	Siswa	Guru	Kelas	Rata-Rata Jml Murid Persekolah	Rata-Rata Jml Guru Persekolah
1	TK Negeri	1	106	14	6	106	14
2	TK Swasta	519	23.997	2.231	1.171	46	4
3	SD Negeri	279	59.091	3.897	2.486	212	14
4	SD Swasta	74	12.338	957	592	167	13
5	SLTP Negeri	49	22.926	1.801	671	468	37
6	SLTP Swasta	38	5.629	723	199	148	19
7	SMU Negeri	19	9.551	950	329	503	50
8	SMU Swasta	15	1.909	331	85	127	22
9	SMK Negeri	13	7.216	795	247	555	61
10	SMK Swasta	7.494	856	265	268	106	31
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.035</b>	<b>150.257</b>	<b>12.550</b>	<b>5.492</b>		

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2012

**Tabel 2.3. Jumlah Guru Berdasar Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang	< S1	S1	S2	S3	Jumlah	Sertifikasi
1	TK	1501	732	12	0	2.245	566
2	SD	1.747	3.408	36	0	5.191	3.253
3	MI	413	1.101	9	0	1.035	302
4	SMP	360	2.046	73	0	3.146	2.680
5	MTs	75	467	39	0	581	405
6	SMA / MA	56	1.281	151	0	1.681	848
7	SMK	160	1.398	95	1	1.654	709

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2012

Dari tabel-tabel di atas diperoleh gambaran bahwa untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sekolah lanjutan pertama jumlah siswa pria lebih banyak dari jumlah wanita, sedangkan pada sekolah lanjutan atas, masih banyak yang memilih sekolah umum dibandingkan sekolah kejuruan. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan

informasi pendidikan berdasarkan tingkat usia pendidikan di

Kabupaten Bantul untuk sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas berkisar sepuluh persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bantul.

Sedang pada tabel 3 persentase untuk yang bersekolah/tamat sekolah dasar mengalami penurunan dibanding tahun 2012, untuk SLTA umum dan kejuruan mengalami peningkatan jumlah peserta. Begitu pula pasca SLTA juga mengalami peningkatan.

b. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan mata pencaharian, terdiri dari penduduk yang bermata pencaharian pada bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi/ transportasi, keuangan dan jasa lainnya.

**Tabel 2.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase
1.	Pertanian	25,56
2.	Pertambangan dan penggalian	1,98
3.	Industri	18,95
4.	Listrik, gas, dan air	0,07
5.	Konstruksi	8,88
6.	Perdagangan	21,16
7.	Komunikasi/transportasi	4,64
8.	Keuangan	1,61
9.	Jasa	16,89
10.	Lainnya	0,27
	Jumlah	100.00



Dari tabel 4 di atas diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul bekerja sebagai petani dengan presentase tertinggi sebesar 25,56%, kemudian masyarakat yang bekerja di sektor industri sebesar 18,5%. angka terkecil masyarakat Bantul bekerja di sektor listrik, gas dan air sebanyak 0,07%.

c. Tenaga Kerja Dan Pengangguran

Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan apabila ternyata SDM di usia produktif banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini mengakibatkan terbentuknya permasalahan sosial yang memerlukan perhatian. Bantul merupakan daerah penyangga bagi Kota Yogyakarta dalam penyediaan jasa tenaga kerja. Dalam kenyataannya tenaga kerja yang ada sebagian besar bukanlah tenaga kerja dengan keahlian yang profesional. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 67.723 orang pengangguran. Untuk menangani masalah pengangguran yang muncul akibat krisis yang dibutuhkan pendekatan multidimensional pada semua sektor.

#### 4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.214	14.454	28.668
2.	Sanden	14.616	15.128	29.744
3.	Kretek	14.131	15.192	29.323
4.	Pundong	15.543	16.236	31.779
5.	Bambanglipuro	18.414	18.897	37.311
6.	Pandak	23.926	23.982	47.908
7.	Bantul	29.681	30.073	59.754
8.	Jetis	25.887	26.426	52.313
9.	Imogiri	28.008	28.528	56.536
10.	Dlingo	17.609	18.058	35.667
11.	Pleret	21.926	21.805	43.731
12.	Piyungan	24.604	24.823	49.427
13.	Banguntapan	62.127	60.383	122.510
14.	Sewon	53.486	52.215	105.701
15.	Kasih	56.487	56.221	112.708
16.	Pajangan	16.493	16.723	33.216
17.	Sedayu	22.197	22.601	44.798
	Jumlah	459.459	461.804	921.263
	Presentase	49,87	50,13	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul 2012

Dari tabel diatas terlihat pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul setiap tahun kanaikannya tidak mencapai 1 persen dari jumlah penduduk tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan upaya penyuluhan masalahkependudukan oleh dinas terkait untuk menahan laju penduduk yang tinggi.

**Tabel.2.6. Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011**

No	Uraian	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD(Rp)
I	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	115.321.898.743,75	128.900.086.173,41
	a. Pajak Daerah	30.802.000.000,00	35.068.591.776,50
	b. Retribusi Daerah	18.791.093.190,00	17.798.603.458
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.390.930.553,75	7.290.930.553,75
	d. Lain-lain PAD	58.337.875.000,00	68.741.960.385,16
II	<b>Dana Perimbangan</b>	710.056.724.015,00	717.123.249.859,00
	a. Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	38.781.324.015,00	46.143.222.859,00
	b. Dana Alokasi Umum	625.350.000.000,00	625.060.827.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	45.925.400.000,00	45.919.200.000,00
III	<b>Pendapatan Lain Yang Sah</b>	339.668.438.400,00	334.527.406.400,00
	a. Pendapatan hibah	21.930.700.000,00	-
	b. Bagi Hasil Pajak Dari Prov. & Pemda Lain	53.123.526.000,00	53.144.140.000,00
	c. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	20.932.086.000,00	37.144.140.000,00
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemda. Lain	243.682.126.400,00	243.734.530.400,00
	<b>Pendapatan</b>	<b>1.165.047.061.158,75</b>	<b>1.180.550.742.432,41</b>

**Tabel. 2.7. Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2011**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	831.395.885.360,64	817.126.901.965,97
	a. Belanja Pegawai	735.538.543.663,00	723.599.430.041,00
	b. Belanja Bunga	120.145.200,00	51.506.911,97
	c. Belanja Subsidi		
	d. Belanja Hibah	24.086.453.000,00	23.888.751.500,00
	e. Belanja Bantuan Sosial	38.269.953.900,00	36.168.122.552,00
	f. Belanja Bagi hasil kpd Prov, Pemda dan Pembawahan	1.909.774.600,00	1.906.274.600,00
	g. Belanja Bantuan Keu. kpd Prov, Pemda dan Pembawahan	30.809.628.500,00	30.446.501.000,00
II	Belanja Tidak Terduga	3.661.395.497,64	1.066.315.361,00
III	<b>Belanja Langsung</b>	359.643.691.859,00	334.808.689.124,00
	a. Belanja Pegawai	63.224.569.818,00	63.518.010.058,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	157.641.283.260,00	151.873.648.857,00
	c. Belanja Modal	138.777.838.781,00	119.417.030.209,00
	<b>Total Belanja</b>	1.191.039.577.219,64	1.151.935.591.089,97

Sumber : DPPKAD, 2012 .

## **B. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Bantul**

### **1. Pemerintahan**

Secara administratif Kabupaten Bantul memiliki 17 Kecamatan, 75

Desa. 022 Pedulubukan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.8. Kecamatan di Kabupaten Bantul**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Desa	Pedukuhan
1.	Srandakan	18,32	2	43
2.	Sanden	23,16	4	62
3.	Kretek	26,77	5	52
4.	Pundong	23,68	3	49
5.	Bambanglipuro	22,7	3	45
6.	Pandak	24,3	4	49
7.	Bantul	21,95	5	50
8.	Jetis	24,47	4	64
9.	Imogiri	54,49	8	72
10.	Dlingo	55,87	6	58
11.	Pleret	22,97	5	47
12.	Piyungan	32,54	3	60
13.	Banguntapan	28,48	8	57
14.	Sewon	27,16	4	63
15.	Kasih	33,38	4	53
16.	Pajangan	33,25	3	55
17.	Sedayu	34,36	4	54
Jumlah			75	933

Sumber : Bappeda Kab. Bantul 2012

Dalam pemerintahan yang demokratis, warga negara di luar pemilu dan partai mempunyai berbagai saluran artikulasi dan representasi dari kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai mereka termasuk kebebasan membentuk dan bergabung dengan beragam perkumpulan dan gerakan independen. Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang berdiri di Kabupaten Bantul merupakan adanya bukti kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Semua organisasi tersebut merupakan modal sosial (*social*

*capital*) sebagai sebuah kekuatan lokal yang dapat dijadikan tempat permainan demokrasi dan tumbuhnya *civil society*.

Demokrasi pemerintahan lokal sulit diwujudkan tanpa adanya partisipasi politik (*political engagement*) dan kontrol dari publik. Seperti diketahui kekuatan-kekuatan politik menyebar dalam masyarakat dan merupakan hasil pertarungan kelompok-kelompok yang saling bersaing. Diantara kekuatan-kekuatan tersebut ada yang pro dan kontra terhadap penguasa daerah.

## **2. Perolehan Suara Pemilu 2004 di Kabupaten Bantul**

Hasil pemilihan umum tahun 2004 secara umum menunjukkan bahwa PDI-P leading, diikuti oleh PAN, PKB yang secara politik di Kabupaten Bantul terbelah menjadi dua aliran utama yakni "kelompok nasionalis" yakni Partai Demokrat, PDI-P, Partai Golkar, "kelompok islam" diantaranya PKB, PAN, PKS, PBB. Pada tabel dapat dilihat hasil perolehan suara partai-partai peserta pemilu 2004.

**Tabel 2.9 Perolehan Suara Partai-partai pada Pemilu 2004**

No.	Parpol	Jml, Suara	Kursi	% Suara	% Kursi
1	PDIP	180.684	16	35,72	35,56
2	PAN	79.335	7	15,68	15,56
3	PKB	58.283	6	11,52	13,33
4	PG	39.154	5	7,74	11,11
5	PKS	31.956	5	6,32	11,11
6	PPP	25.801	3	5,1	6,67
7	PKPB	24.395	2	4,82	4,44
8	PD	15.493	1	3,06	2,22
9	PBB	8.677	0	1,72	0
10	PNBK	5.573	0	1,1	0
11	PBR	5.461	0	1,08	0
12	PDS	4.909	0	0,97	0
13	PNU	4.714	0	0,93	0
14	PPD	4.031	0	0,8	0
15	PKPI	3.041	0	0,6	0
16	PPDI	2.873	0	0,57	0
17	PM	2.149	9	0,42	0
18	PNI	2.084	0	0,41	0
19	PSI	1.950	0	0,39	0
20	PDK	1.930	0	0,38	0
21	PPPan	1.558	0	0,31	0
22	PPel	1.097	0	0,22	0
23	PBSD	523	0	0,1	0
24	PIB	205	0	0,04	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>505.876</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : KPU Kabupaten Bantul, 2007

Berdasarkan tabel di atas dari 24 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bantul hanya 8 partai politik yang mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya,

Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Demokrat. 16 partai yang lain tidak mendapatkan kursi karena kalah bersaing di lima daerah pemilihan (dapil).

Daerah Pemilihan di Kabupaten Bantul terdiri atas lima wilayah yaitu Bantul I terdiri atas kecamatan Bantul, Jetis dan Bambanglipuro dengan alokasi kursi 8 kursi, Bantul II dengan alokasi 9 kursi terdiri atas Kecamatan Kasihan, Sedayu dan Pajangan. Dapil Bantul III dengan alokasi 10 kursi terbagi atas Kecamatan Banguntapan dan Sewon, Di Dapil Bantul IV dengan alokasi 9 kursi meliputi Kecamatan Piyungan, Pleret, Imogiri dan Dlingo, sedangkan Dapil Bantul V dengan alokasi 9 kursi terdiri atas lima Kecamatan yakni, Pandak, Pundong, Sanden, Srandakan dan Kretek.

### **3. Perolehan Suara Pemilu 2009 di Kabupaten Bantul**

Hasil pemilihan umum tahun 2009 secara umum menunjukkan bahwa PDI-P leading, diikuti oleh PAN dan Partai Demokrat. Secara politik di Kabupaten Bantul terbelah menjadi dua aliran utama yakni "kelompok nasionalis" yakni Partai Demokrat, PDI-P, Partai Golkar, "kelompok islam" diantaranya DKB DAN PKS. DDD. Pada tabel dapat dilihat hasil perolehan



**Tabel 2.10 Perolehan Suara Partai-partai pada Pemilu 2009**

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	% Suara	% Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	112.662	11	23.74	24.4
2	Partai Amanat Nasional	67.118	7	14.14	15.6
3	Partai Demokrat	60.278	5	12.70	11.1
4	Partai Keadilan Sejahtera	39.573	5	8.34	11.1
5	Partai Golkar	38.629	5	8.14	11.1
6	Partai Persatuan Pembangunan	25.420	4	5.36	8.9
7	Partai Kebangkitan Bangsa	23.491	3	4.95	6.7
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.246	3	3.85	6.7
9	Partai Karya Peduli Bangsa	12.040	2	2.54	4.4
10	Partai Hanura	8.788	0	1.85	0
11	Partai Demokrasi Pembaruan	6.997	0	1.47	0
12	Partai Bulan Bintang	5.752	0	1.21	0
13	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	5.634	0	1.16	0
14	Partai Demokrasi Kebangsaan	5.481	0	1.13	0
15	Partai Pemuda Indonesia	4.685	0	0.99	0
16	Partai Bintang Reformasi	3.125	0	0.66	0
17	Partai Patriot	2.888	0	0.61	0
18	Partai Republika Nusantara	2.549	0	0.54	0
19	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2.503	0	0.53	0
20	Partai Peduli Rakyat Nasional	2.185	0	0.46	0
21	Partai Barisan Nasional	1.938	0	0.41	0
22	Partai Damai Sejahtera	1.815	0	0.38	0
23	Partai Karya Peduli Bangsa	1.652	0	0.33	0
24	Partai Persatuan Daerah	1.556	0	0.28	0
25	Partai Matahari Bangsa	1.319	0	0.20	0
26	Partai Indonesia Sejahtera	947	0	0.12	0
27	Partai Pelopor	591	0	0.09	0
28	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	447	0	0.08	0
29	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	375	0	0.08	0
30	Partai PNI Marhaenisme	367	0	0.08	0
31	Partai Merdeka	293	0	0.06	0
32	Partai Karva Perjuangan	105	0	0.02	0

33	Partai Buruh	80	0	0.02	0
34	Partai Sarikat Indonesia	78	0	0.02	0
35	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0	0
36	Partai Kedaulatan	0	0	0	0
37	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	0	0
38	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0	
Jumlah		474.537	45	100	100

Sumber : KPUD Kabupaten Bantul, 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 38 partai politik peserta pemilu (Jumlah partai peserta pemilu nasional 44 partai, termasuk 6 partai politik lokal di NAD) di Kabupaten Bantul hanya 9 partai politik yang mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai politik lain sebanyak 29 partai yang lain tidak mendapatkan kursi karena kalah bersaing di lima daerah pemilihan (dapil).

Daerah Pemilihan di Kabupaten Bantul terdiri atas lima wilayah yaitu Bantul I terdiri atas Kecamatan Bantul, Jetis dan Bambanglipuro dengan alokasi kursi 8 kursi, Bantul II dengan alokasi 9 kursi terdiri atas Kecamatan Kasihan, Sedayu dan Pajangan. Dapil Bantul III dengan kuota 10 kursi terbagi atas Kecamatan Banguntapan dan Sewon, Di Dapil Bantul IV dengan alokasi 9 kursi meliputi Kecamatan Bisunggan, Pleret, Imogiri dan Dlingo

sedangkan Dapil Bantul V dengan alokasi 9 kursi terdiri atas lima Kecamatan yakni, Pandak, Pundong, Sanden, Srandakan dan Kretek.

### **C. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul**

Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara historis, penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini merupakan peristiwa yang kedua kali terjadi sejak Republik ini berdiri. Tentunya hal ini merupakan awal kebangkitan pelaksanaan demokratisasi di Indonesia yang selama ini tumbuh massif sejak pasca lengsernya kekuasaan Orde Baru yang sentralistik-otoritarian pada 1998.

Konsekuensi dari implementasi demokrasi material ini adalah terjadinya beberapa perubahan fundamental dalam teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. Perubahan elemen teknis pada Pemilu 2014 dimaksudkan agar sistem Pemilu 2014 bisa lebih sesuai dengan prinsip demokrasi serta memenuhi kebutuhan bangsa, yaitu terpilihnya anggota DPR disetiap tingkatan, Presiden dan Wakil Presiden dan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung yang merupakan pilihan rakyat sehingga legitimasinya kuat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Adanya beberapa perubahan aturan yang cukup mendasar di atas merupakan resultan dari pertarungan kepentingan antar partai politik di DPR yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu yang secara hirarki mesti

diimplementasikan oleh KPU. Tentunya hal itu bukan pekerjaan mudah bagi KPU untuk dapat menterjemahkan aturan yang tertuang dalam UU ke dalam kegiatan praktis di lapangan.

Penyusunan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2013-2018 pada dasarnya melatar belakangi keinginan untuk menegakkan demokrasi dengan melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundangan tentang Pemilu yang berlaku.

Untuk mengaplikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam perumusan manajemen kebijakan publik serta indikator keberhasilan pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Strategis sebagai pedoman yang diterapkan secara utuh di lingkungan KPU Kabupaten Bantul dan jajarannya. Dalam Rencana Strategis ini akan dijelaskan pula tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Strategis KPU Kabupaten Bantul.

### **1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Bantul**

VISI yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum di masa depan. Sedangkan

MISI yang ditetapkan lebih merupakan "The chosen goal" atau peran

strategis yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai VISI tersebut.

**a. Visi KPU adalah:**

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan Asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

**b. Misi KPU adalah:**

- 1) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan Pejabat Publik lain yang ditentukan undang-undang.
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 3) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsistensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum

## **2. Personil KPU Kabupaten Bantul Periode 2013-2018**

Ketua merangkap Anggota : Johan Komara, SIP

Anggota : Drs. Syachruddin, SE

(Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga)

: Didik Joko Nugroho, S.Ant

(Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik serta Umum, Rumah Tangga dan Organisasi)

: Titik Istiyawatun Khasanah, SIP

(Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Humas dan Pengembangan SDM)

: Arif Widayanto, S.Fil.

(Divisi, Kajian dan Data Informasi)

## **3. Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 10 ayat 4 (Empat), adapun Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah :

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu

2. Memperlakukan peserta Pemilu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.

11. Melaksanakan keputusan DKPP, dan

12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.

2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, secara adil dan setara.

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan

12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### **4. Program Sosialisasi KPU Kabupaten Bantul**

Untuk mencapai target partisipasi pemilih mencapai 75 persen pada Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 KPU Kabupaten Bantul terus melakukan sosialisasi melalui berbagai metode antara lain melalui media elektronika radio (Radio Persatuan, Bantul Radio dan Radio Rasialima) berupa tayangan iklan layanan masyarakat serta mengisi siaran langsung pada acara Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta (tanggal 11 Maret 2014)), jalan santai sosialisasi Pemilu 2014 (Tanggal 9 Maret) untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Adapun melalui metode tatap muka dengan mengefektifkan peran Relawan Demokrasi (Relasi) dengan menghadiri segmen masyarakat pemilih, penyuluhan yang dilakukan oleh PPK dan PPS serta oleh Komisioner KPU kepada kelompok-kelompok masyarakat, penyebaran bahan sosialisasi berupa modul serta alat peraga sosialisasi lainnya (contoh surat suara, poster daftar calon)..

Salah satu alat peraga sosialisasi berupa baliho dan spanduk berisi ajakan untuk memilih pada Pemilu tanggal 9 April 2014 hari Rabu Pon yang telah dipasang pada tempat-tempat strategis, untuk baliho ukuran 4

x 6 meter sebanyak 05 buah tersebar di setiap Kecamatan, desa serta di

ibukota Bantul. Sedangkan spanduk sebanyak 201 buah telah terpasang di seluruh kecamatan dan desa se Kabupaten Bantul.

Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten menghadapi Pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pemilu di tingkat Kecamatan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan sasaran utama yaitu para tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 27 November 2013 di Pendopo masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Bantul sebanyak 17 Kecamatan. Peserta terdiri dari berbagai unsur yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, aktifis organisasi masyarakat, tokoh partai politik dan aparat Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan pihak Kecamatan. Narasumber : semua anggota KPU Kabupaten Bantul.

b. Sosialisasi untuk Penyuluh Agama Islam.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran yaitu para penyuluh agama Islam se-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan oleh para penyuluh agama Islam sehingga diharapkan setelah mendapat penyuluhan pemilu dari KPU Bantul dapat menyampaikan kepada jamaah di masjidnya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2013 di Masjid Agung.

Kegiatan ini melanjutkan program sosialisasi di tingkat Kecamatan, dengan sasaran para tokoh masyarakat di tingkat Kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 23 Desember 2013 di 75 Desa se-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di masing-masing Kelurahan. Narasumber : Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

d. Pencanaan Pekan Sosialisasi Pemilu 2014

Kegiatan ini dirancang sebagai momentum dimulainya Pekan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2014 di Gedung Pamungkas. Sasaran/Peserta Kegiatan ini adalah kepala Pedukuhan se Kabupaten Bantul (sebanyak 933 Dukuh). Dalam kegiatan tersebut selain acara seremonial juga ditampilkan simulasi Pemilu oleh anggota KPUD dan Wakil Bupati Bantul. Pada acara tersebut juga disampaikan materi sosialisasi pemilu dari KPU Propinsi DIY khususnya berkaitan dengan materi pendaftaran pemilih.

e. Sosialisasi untuk Narapidana.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran utama para pemilih dengan kubutuhan khusus yaitu para narapidana Penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 di LAPAS Kelas III Paingan Bantul. Kegiatan ini sekaligus

juga dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi dalam rangka persiapan teknis pendirian TPS Khusus di Lapas tersebut.

f. Sosialisasi untuk Penyandang Cacat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran utama para pemilih dengan kebutuhan khusus yaitu para Penyandang Cacat (difabel) se-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2014 di Pendopo Parasamnya Pemkab Bantul. KPU Kabupaten Bantul bekerjasama dengan LSM CIQAL dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Dalam acara tersebut diadakan simulasi pemungutan suara dengan menggunakan berbagai alat Bantu bagi pemilih defabel. Peserta kegiatan ini adalah Penyandang Cacat se-Kabupaten Bantul dan anggota PPK serta PPS.

g. Sosialisasi untuk Siswa SMU

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan Pemilu kepada Para Pemilih Pemula khususnya Siswa SMU. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Peserta kegiatan ini para siswa SMU yang telah memiliki hak pilih. Kegiatan ini diselenggarakan dengan kegiatan pemilihan ketua OSIS (pemilos)